

Implementasi gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai wahana pendidikan nilai

Syifa Siti Aulia, Dikdik Baehaqi Arif, Rosidah Amalia, Nurul Hidayati, Refa Annisa Yudha

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gerakan penguatan pendidikan karakter ditinjau dari 3 aspek yakni kebijakan, pelaksanaan, dan penilaian terlaksananya kegiatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yaitu Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan gerakan penguatan pendidikan karakter yang sistematis komprehensif dari segi kebijakan yakni dengan terbitnya peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan. Pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter di SMP/MTS lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan terdiri dari 3 basis utama yakni, keagamaan, pengamalan nilai Pancasila, dan budaya kemandirian. Evaluasi dilakukan dalam konsep monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui observasi (pengamatan langsung) untuk mengumpulkan data baik administratif maupun catatan pendukung untuk menilai kegiatan penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci: Gerakan, Penguatan Pendidikan Karakter. Kabupaten Kulon Progo

Implementation of the movement to strengthen character education as value education

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the movement to strengthen character education in terms of 3 aspects policy, implementation, and assessment of the implementation of activities. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The object of the study was the Movement for Strengthening Character Education in Kulon Progo Regency. Data collection uses observation, interview, and documentation techniques. Data analysis using interactive model analysis techniques from Miles and Huberman. The results showed that Kulon Progo district has implemented a systematic comprehensive character education strengthening movement in terms of policy, namely with the issuance of Kulon Progo Regent Regulation Number 65 of 2017 concerning guidelines for the implementation of strengthening character education in education units. The implementation of strengthening character education in Kulon Progo Regency consists of 3 main bases, namely, religion, the practice of Pancasila values, and the culture of humanity. Evaluation is carried out in the concept of monitoring and evaluation carried out through observation (direct observation) to collect data both administrative and supporting records to assess character education strengthening activities carried out by the Youth Education and Sports Office of Kulon Progo District.

Keywords: Movement, Strengthening Character Education, Kulon Progo Regency

PENDAHULUAN

Gerakan nasional pendidikan karakter merupakan agenda yang dilaksanakan

sudah sejak tahun 2010, bahkan berdasarkan laporan evaluasi gerakan tersebut telah menghasilkan beberapa

sekolah rintisan yang dianggap telah mampu untuk melaksanakan pembentukan karakter. Tahun 2010, telah dilahirkan juga dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) berkaitan dengan mengembangkan rintisan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia dengan delapan belas (18) nilai karakter yang dikembangkan. Dalam implementasinya, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota memegang peranan penting untuk kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang dikembangkan tersebut. Pada praktiknya tidak semua daerah mampu untuk mengembangkan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tersebut bahkan dalam satu kajian ilmiah diungkapkan bahwa program PPK tersebut baru bergeliat di program-program pendidikan dasar (Lestari, 2018). Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang telah memiliki buku panduan yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terutama yang berkaitan dengan penguatan Pendidikan karakter di sekolah. Dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang proses implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter tersebut di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

PPK lahir dari proses kebijakan tentang gerakan pendidikan revolusi mental yang memiliki tujuan untuk membangun karakter. Tahun 2010 kebijakan tentang Pendidikan berbasis karakter ini telah lahir dan berkembang di lingkungan Pendidikan. Kemudian di Tahun 2017, dikeluarkan peraturan presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah pikir, olah rasa, dan olah raga dengan pelibatan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan kebijakan tersebut lahirlah banyak penelitian yang berupaya mengungkap bagaimana pola implementasi penguatan pendidikan karakter di

Indonesia. Telah dilakukan penelitian yang mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi di Kabupaten Kulon Progo dianggap bahwa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter belum efektif (Yulianto et al., 2020). Kritikus baru-baru ini menyarankan bahwa pendidikan terlalu individual sehingga gagal untuk terlibat secara memadai dengan politik (Peterson, 2020). Klaim penelitian Muassomah (2020), meskipun pendidikan karakter diakui perlu untuk mempersiapkan generasi masa depan negara, sistem saat ini belum mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pemuda Indonesia atau menanamkan mereka dengan karakter dan nilai-nilai yang diinginkan

Penerapan literasi digital menjadi temuan model dalam transformasi pendidikan karakter siswa yang tidak terlepas dari peran guru dalam kegiatan pembelajaran yang diterapkan sejalan dengan visi, tanggung jawab, kepekaan sosial, kemampuan logis dan kejujurannya untuk menghasilkan output yang dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi digital global dengan alur aplikasi perkembangan, teknologi dan untuk dapat bersaing di tingkat internasional (Dewi & Alam, 2020). Sementara itu praktik Pendidikan Karakter di Inggris fokus dalam tiga bidang: mengembangkan atribut yang diperlukan untuk belajar dengan baik dengan orang lain, mengembangkan keterampilan metakognitif untuk berfungsi sebagai agen etika otonom, dan untuk bekerja dengan sekolah untuk memastikan tekanan eksternal tidak didahulukan daripada berkembangnya siswa (Hart, 2022).

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi terkait proses implementasi penguatan Pendidikan karakter di Kulon Progo tersebut secara praktik bukan hanya dalam kajian administratif yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut.

Selain penelitian di atas terdapat juga penelitian evaluasi kaitannya dengan pelaksanaan program Pendidikan karakter di Sekolah Dasar di Kulon Progo dengan 4 Subjek Penelitian di sekolah Dasar di

Kabupaten Kulon Progo dengan gambaran hasil salah satunya berkaitan dengan sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini dinas Pendidikan, pemuda, dan olahraga Kulon Progo belum efektif dalam memberikan akses untuk implementasi program Pendidikan karakter tersebut (Darmayanti & Wibowo, 2014). Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini akan memberikan gambaran pola kebijakan sampai dengan proses pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan tidak hanya dari sisi implementasi sekolah dasar namun juga di tinjau dari sekolah menengah pertama.

Peneliti pun dalam hal ini pernah melakukan kajian berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter antara lain tahun 2016 Peneliti melakukan kajian "Wawasan Global Mahasiswa dalam mata Kuliah PKn" (S. S. Aulia, 2016). Tahun 2019 Peneliti melakukan kajian tentang "Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal" (S. S. Aulia & Arpanudin, 2019). Tahun 2021, Peneliti melakukan kajian tentang "Pembentukan Karakter nasionalis di Sekolah Muhammadiyah" (S. S. Aulia et al., 2021) Tahun 2022, peneliti melakukan kajian tentang "Penguatan budaya sekolah dalam pemahaman hak konstitusional" (S. Aulia et al., 2022).

Di ruang lingkup pendidikan formal, penguatan karakter sebagai pendidikan nilai memang perlu untuk pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*value-based education*) menjadi penting agar tercipta siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian (Handoyo & Susanti, 2014). Ranah pendidikan khususnya sekolah sebagai lembaga kultural merupakan tempat untuk melakukan gerakan antikorupsi dengan pendekatan kultural. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting untuk melakukan penguatan gerakan pendidikan karakter yang salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) di sekolah (Murdiono, 2016). Pada konteks ke-Indonesia-an, pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn merupakan suatu bentuk gerakan politik nasional untuk melawan korupsi sebagai perwujudan dari gerakan reformasi nasional (Samsuri, 2011).

Kabupaten Kulon Progo dengan program Penguatan Pendidikan Karakter menarik untuk dikaji dari sisi penguatan, pelaksanaan dan evaluasinya. Maka penelitian ini mengkaji pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di SMP/MTS lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan terdiri dari 3 basis utama yakni, keagamaan, pengamalan nilai Pancasila, dan budaya kemandirian.

METODE

Penelitian gerakan penguatan pendidikan karakter menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan pendidikan karakter pada jenjang persekolahan di Kabupaten Kulon Progo yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada tahun 2022. Peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak melalui wawancara sehingga dapat memahami lebih jauh permasalahan yang diteliti. wawancara kualitatif bersifat fleksibel dan dinamis yang seringkali tidak langsung, tidak terstruktur, tidak standar, dan terbuka (Taylor et al., 2016). Selain wawancara dan observasi, dilakukan pelacakan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Beragam dokumen menjadi bahan menarik bagi peneliti kualitatif (Bowen, 2009). Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap bahan cetakan seperti catatan pengadilan, laporan kasus, risalah rapat, brosur, buku harian, foto, surat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian (Padgett, 2017). Studi dokumentasi dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber berupa

dokumen dan catatan untuk pengembangan analisis kajian.

Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Langkah-langkah analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (*data verification*). Verifikasi data dilakukan dengan menghubungkan data sehingga terbentuklah pola. Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengetahui bagaimana pola implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian dasar dikarenakan dalam penelitian ini berupaya untuk mendapatkan suatu generalisasi berkaitan tentang fenomena pelaksanaan PPK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang kemudian dianalisis sehingga mendapatkan pengetahuan baru untuk dikembangkan berkaitan dengan pola penguatan pendidikan karakter di lingkungan dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kulon Progo memiliki kebijakan tentang Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan yang terdiri dari 17 pasal dan enam bab. Dari peraturan Bupati tersebut, ada hal menarik dari hasil penelitian bahwa di kebijakan dan pelaksanaan prioritas pengembangan nilai karakter daerah, yakni religius dan semangat kebangsaan yang harus dijunjung tinggi. Pengembangan nilai religius dan semangat kebangsaan yang diutamakan sesuai dengan visi Kabupaten Kulon Progo, yakni "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa".

Iman dan takwa tersebutlah yang menjadi gambaran terciptanya masyarakat religius di Kabupaten Kulon Progo.

Religius berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai agama. Pemahaman mendasar tentang agama adalah bahwa agama menyediakan cara hidup bagi orang yang percaya (Oulad, 2015). Namun, bagi individu, agama dan spiritualitas lebih dari sekadar cara memahami dunia, namun terkait perjalanan setelah di dunia. Agama adalah sumber utama kohesi sosial yang menjaga keteraturan nilai-nilai sosial di mana individu mengontrol tindakan diri sendiri dan orang lain. Artinya bahwa religiusitas bukan hanya keyakinan tentang Tuhan dan spiritualitas bukan hanya kesatuan dengan kehidupan (Zinnbauer & Pargament, 2005). Kedua konstruksi itu mengandung dimensi vertikal dan horizontal. Dalam pandangan lain disebut sebagai kesalehan secara pribadi dan kesalehan sosial.

Pelaksanaan PPK di Kulon Progo memiliki silabus dengan 3 basis utama yakni (1) silabus keagamaan, (2) silabus pengamalan nilai Pancasila, dan (3) silabus kegiatan budaya kemataraman. *Pertama*, dalam silabus keagamaan dikembangkan dengan kompetensi berbeda untuk tiap jenjang dan agama yang ada. Hal ini berkaitan dengan

Kedua, silabus kegiatan pengamalan nilai Pancasila terdiri pemahaman, pengamalan, dan pembudayaan sila-sila Pancasila dalam kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Pemahaman terhadap nilai Pancasila dimulai dari pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Adhayanto et al., 2021). Demokrasi adalah elemen penting dalam pemerintahan yang baik tetapi bukan yang memadai atau terbaik karena ada kelemahan-kelemahan dalam sistem ini (Fuad, 2015; Jati, 2017; Pamungkas, 2017; Suyato, 2016). Salah satu kelemahan mendasar adalah apabila orang baik tidak turut serta berpartisipasi maka demokrasi akan menjadi hantu yang mengerikan. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahannya, para pendiri bangsa Indonesia melandasi pilihan demokrasi

atas dasar ketuhanan. Hal ini menandakan bahwa wujud demokrasi Indonesia bersendikan akan adanya kuasa Allah yang merahmati bangsa Indonesia sebagaimana bunyi dari pembukaan konstitusi UUDNRI 1945.

Sejak awal, Pancasila membangkitkan emosi yang besar dan mengalami berbagai interpretasi. Jalan menuju pemahaman tentang perannya sebagai batu fondasi negara telah berubah berkali-kali sejak 1945, dan telah didefinisikan ulang, digunakan secara umum untuk tujuan politik, dan signifikansinya dipertanyakan. Namun satu hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa Pancasila telah membentuk sejarah dan budaya Indonesia. Seperti halnya setiap negara diyakinkan bahwa itu unik karena berbagai alasan, demikian pula orang Indonesia secara luas diyakinkan akan keunikan filosofi nasional mereka, dan ini terbukti dalam bentuk pengabdian mereka yang tak tergoyahkan kepada Pancasila (Glab, 2020).

Sebagai komponen integral bangsa ini, kita harus sepakat bahwa Pancasila adalah sebuah konsep revolusioner yang memajukan peradaban, khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila sekaligus membentuk watak dan jati diri bangsa yang besar, modern, bermartabat dan beradab (Amir, 2013). Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus menjadi roh setiap denyut kehidupan warga negara dan aktivitas ketatanegaraan, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dalam berbagai pemikiran parsial tentang agama, pendidikan, budaya, politik, sosial bahkan ekonomi (Amir, 2013).

Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat. Artinya di dalamnya terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis. Agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari tetapi juga dinamis berkembang, nilai luhur dan nilai dasarnya harus dapat bersifat tetap, sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi dengan perkembangan tuntutan zaman.

disamping itu, Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (*science of knowledge*) yang dalam karya-karya berikutnya ditunjukkan segi-segi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya sebagai *raison d'etre* bagi Pancasila sebagai suatu paham atau aliran filsafati (Siswomihardjo, 1995). Dengan demikian perlu langkah-langkah radikal dalam mencetak warga negara yang terpelajar dan maju seperti yang tertera dalam sila kelima (Hardiyanti, 2022). Pendidikan yang adil dan tidak memandang adalah salah satu bentuk revolusi mental dengan nilai return investasi yang besar.

Pengetahuan yang bersifat kefilosofan mengenai Pancasila memiliki kesesuaian dengan proses tercapainya kesiapan pribadi. Dengan adanya pengetahuan yang bersifat kefilosofan mengenai hakikat Pancasila, itu berarti adanya dasar yang kuat dan kekal untuk terbentuknya *way of life* negara, bangsa dan warga negara (Edwin, 2006). Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari lima sila itu memiliki banyak sumber pengetahuan yang sudah seharusnya mampu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, dan dijadikan petunjuk dalam berperilaku. Pengetahuan yang terkandung di dalam Pancasila sesungguhnya sudah cukup untuk mengatasi persoalan kebangsaan dan membawa kemajuan jika ia diterapkan secara *genuine* di dalam menjalankan semua aktivitas, tugas negara maupun tugas akademik.

Sistem filsafat di dalam nilai-nilai Pancasila mengandung ajaran tentang potensi dan martabat manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan. Karena itu, ketika seseorang mampu menghayati dan menjiwai nilai-nilai budi pekerti dari Pancasila, besar kemungkinan karakter masyarakat Indonesia akan lebih baik dalam berperilaku sehingga apa yang dicita-citakannya akan tercapai serta menjadikan jati diri bangsa Indonesia lebih bermartabat (Kusdarini et al., 2020). Pada kondisi saat ini, nilai-nilai kebangsaan, seperti nilai agama, nilai kemanusiaan,

dan nilai kerukunan, dapat dijadikan pedoman perilaku dan sikap dalam menghadapi kesulitan di wilayah Covid-19 (Hardiyanti, 2022; Wen Lee & Ande, 2022).

Ketiga, silabus kegiatan budaya kemataraman mengungkap 10 unsur budaya yang dikembangkan di Jawa yakni membaca dan menulis aksara Jawa, bahasa dan sastra Jawa, adat istiadat Jawa, kriya, arsitektur, boga, sosial-jati diri, ekonomi, politik kekuasaan, dan kesenian Jawa dengan implementasi kompetensi melalui pengenalan unsur budaya tersebut, apresiasi/internalisasi unsur budaya tersebut, dan aktualisasi unsur budaya tersebut.

Nilai kemataraman merupakan kearifan lokal yang dipahami sebagai gagasan, nilai, pandangan lokal yang arif, penuh kearifan, nilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat (Puspitasari & Rukiyati, 2020). Maka dalam keseharian kehidupannya masyarakat Jawa memakai menggunakan simbol kearifan lokal dalam kehidupannya. Pada situasi yang demikian, pengaruh agama terhadap budaya Jawa semakin memperkuat penggunaan simbol dalam masyarakat Jawa (Idrus, 2007).

Relasi antara nilai kemataraman dan nilai agama bahwa budaya jika ditinjau dari struktur dan tingkatannya dapat dijelaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan budaya Jawa sebagai kebudayaan yang menjadikan Islam dapat diterima masyarakat Yogyakarta sebagai agama yang benar (Rahman & Hidayah, 2011). Nilai-nilai agama Islam menyatu dengan kehidupan keseharian masyarakat Yogyakarta, sehingga banyak cara berpikir dan tindakan yang dilakukan cenderung Islami. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seni, sastra, kegiatan sosial dan prinsip hidup yang diyakini masyarakat Yogyakarta (Rahman & Hidayah, 2011).

Dalam tradisi keluarga Jawa, anak sejak kecil telah dikenalkan dengan beragam nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Mengingat tradisi Jawa yang dimilikinya, para keluarga Jawa cenderung sejak awal

terlebih dahulu mengenalkan nilai-nilai yang lebih berorientasi budaya mereka. Nilai-nilai budaya Jawa dicirikan oleh norma-norma budaya yang berbeda, strata sosial, dan nilai-nilainya yang telah bercampur menjadi satu, sehingga menghasilkan perilaku tertentu yang diharapkan terjadi di masyarakat (Irawanto et al., 2011).

Apabila merujuk pandangan Ki Hajar Dewantara, Dewantara (Dewantara, 2011) menjelaskan pemahaman terkait pendidikan yakni “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya.” Singkatnya, pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara (Kumalasari, 2015) berarti upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani peserta didik. Peserta didik hanya dapat berkembang ketika pendidikan dilakukan tanpa paksaan dan tanpa perintah.

Pandangan tersebut merupakan bentuk kritik Ki Hajar Dewantara pada pendidikan Barat yang menurutnya dasar dari pendidikan Barat yaitu perintah, hukuman, dan ketertiban. Dasar pendidikan tersebut menjadikan peserta didik akan rusak budi pekertinya (Dewantara, 2011). Pendidikan sebagai “tuntunan” menunjukkan bahwa di dalam pertumbuhan peserta didik dapat dipengaruhi oleh banyak hal dan pendidikan memiliki perannya di sana.

Bagi Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan tersebut terkait dengan pembentukan budi pekerti. Jika peserta didik tidak baik “dasar jiwanya”, tentu ia harus mendapatkan pendidikan agar bertambah baik budi pekertinya. Peserta didik yang tidak baik ‘dasar jiwanya’ dan tidak mendapat pendidikan akan mudah menjadi orang yang jahat atau buruk adabnya (Dewantara, 2011). “Dasar jiwa” yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri, sebelum mendapat pengaruh dari luar.

Teori “dasar jiwa” tersebut dapat dilihat dari tiga aliran. *Pertama*, teori *tabula rasa* (lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh pendidik). Teori ini memandang bahwa peserta didik diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong tersebut menurut kehendaknya. Artinya pendidik berkuasa seluasnya untuk membentuk watak atau budi pekerti seperti yang diinginkannya. *Kedua*, aliran negatif yang memandang peserta didik lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya hingga tidak memungkinkan pendidikan dari siapa pun dapat mengubah watak peserta didik. Pendidikan hanya dapat mengawasi agar tidak sampai ada pengaruh jahat yang mendekati peserta didik. Pendidikan menurut teori ini dianggap dapat menolak pengaruh dari luar dan mewujudkan budi pekerti yang tidak tampak ada dalam jiwa peserta didik (Dewantara, 2011). *Ketiga*, teori konvergensi, yaitu teori yang memandang peserta didik yang dilahirkan dapat diumpamakan sehelai kertas yang telah ditulis penuh, akan tetapi tulisan tersebut masih suram. Menurut aliran ini, pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan mengisinya dengan kebaikan, agar tampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat agar jangan sampai menjadi tebal (Dewantara, 2011).

Berdasarkan ketiga teori tersebut, Ki Hajar Dewantara lebih cenderung pada teori konvergensi. Pada penjelasannya, teori konvergensi membagi watak manusia menjadi dua. Bagian pertama dinamakan bagian *intelligible* yakni yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran yang dapat berubah karena pengaruh pendidikan atau keadaan. Bagian kedua merupakan bagian biologis (malu, takut, pemarah, dll) dan tidak dapat berubah selama hidup. Meskipun demikian, tabiat-tabiat “biologis” dapat dikendalikan dengan “menguasai diri”. Oleh karena itu, “menguasai diri” atau “*zelfbeheersching*” disebut dengan tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban.

“*Beschaving is zelfbeheersching*” (adab itu, tidak lain dan tidak bukan adalah menguasai diri) (Dewantara, 2011).

Kegiatan penilaian gerakan PPK di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Monitoring Penguatan Pendidikan Karakter di Lingkungan SMP/MTS Kulon Progo bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan penguatan pendidikan karakter telah sesuai dengan yang diharapkan sedangkan evaluasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan PPK di sekolah/Madrasah terhadap target yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan PPK di Kulon Progo berjalan dengan baik, sebagaimana penelitian Retnasari & Sumaryati (2021) tentang “kolaborasi dengan wali murid dan alumni sebagai tokoh masyarakat, penggunaan buku pantauan kegiatan nilai-nilai karakter, mengunjungi pabrik industri, pondok pesantren, pasar, bank sampah dan komunitas lainnya yang memberikan dampak positif dalam rangka menumbuhkan kembangkan nilai kejujuran, tanggung jawab dan cinta kebenaran pada peserta didik.

Penelitian Darmayanti & Wibowo (2014, p. 233) mengemukakan fakta di lapangan bahwa “(1) kesiapan sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo untuk mengimplementasikan pendidikan karakter baik, dinilai dari kurikulum yang telah terintegrasi pendidikan karakter, namun masih kurang dalam hal pengelolaan sarana prasarana pendukung dan banyak guru memerlukan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan karakter; (2) implementasi pendidikan karakter belum tampak pada kegiatan pembelajaran; (3) dukungan dari pemerintah dalam sosialisasi atau pelatihan dirasa masih kurang oleh sekolah; (4) monitoring dan evaluasi pendidikan karakter masih

terbatas pada kurikulum dan dilakukan melalui pembinaan pengawas di setiap sekolah; dan (5) kendala yang umum dihadapi sekolah adalah penilaian sikap siswa yang belum terdokumentasi, kurangnya pemahaman guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter, dan tidak adanya sinergi antara pendidikan di sekolah”.

Beragam fakta di lapangan menjadi perhatian serius bagi dinas pendidikan untuk memastikan proses penanaman Pendidikan karakter pada jenjang persekolahan terlaksana dengan baik. Penelitian-penelitian yang dilakukan menjadi umpan balik yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo.

SIMPULAN

Kabupaten Kulon Progo telah memiliki kebijakan khusus berkaitan tentang Pengelolaan Penguatan Pendidikan Karakter yakni Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan pendidikan Kabupaten Kulon Progo di Jenjang SMP/MTS telah melaksanakan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dengan silabus yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pelaksanaan penilaian Gerakan PPK Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun peneliti belum sampai pada analisis instrumen monitoring dan evaluasi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan staf pada di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terutama Kepala Bidang Pengembangan SMP/MTS atas sumbangan pemikiran, dan masukan-masukan, serta dialog kreatif mengenai Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo sehingga diperoleh data yang memadai dan

akhirnya artikel ini selesai ditulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah mendanai kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., Rahmawati, N., Haryanti, D., Suwardi, N., & Pambudi, R. (2021). The strategy of strengthening Pancasila ideology in the digital age. *Pancasila and Law Review*, 2(2), 99-108. <https://doi.org/10.25041/PLR.V2I2.2396>
- Amir, S. (2013). Pancasila as integration philosophy of education and national character. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 2(1), 54-57.
- Aulia, S. S., & Supriyanti, S. (2022). Penguatan budaya sekolah dalam pemahaman hak konstitusional melalui tim konstitusi. *Integralistik*, 33(1), 44-51. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.33264>
- Aulia, S. S. (2016). Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 66-81.
- Aulia, S. S., Arif, D. B., Sofihara, I., Utami, A. P., Laelaturrohmah, L., & Arpanudin, I. (2021). Nationalist character at Muhammadiyah school. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 172-178. <https://doi.org/10.21831/JC.V18I1.39183>
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. In

- Qualitative Research Journal* (Vol. 9, Issue 2, pp. 27-40).
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Darmayanti, S. E., & Wibowo, U. W. B. (2014). Evaluasi program pendidikan karakter di sekolah dasar Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2), 223-234.
<https://doi.org/10.21831/jpe.v2i2.2721>
- Dewantara, K. H. (2011a). *Bagian pertama: pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dewi, E. R., & Alam, A. A. (2020). Transformation model for character education of students. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1228-1237.
<https://doi.org/10.18844/CJES.V15I5.5155>
- Edwin, S. F. (2006). *Prof. Notonagoro dan Pancasila. Analisis tekstual dan kontekstual*. Universitas Gadjah Mada.
- Fuad, Z. M. (2015). Peran pemuda relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah (studi pada relawan demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), 23-33.
<https://doi.org/10.22146/jkn.6891>
- Głąb, K. M. (2020). The culture of pancasila. An Indonesian concept that fuses the impossible. *Acta Asiatica Varsoviensia*, 2020(33), 5-21.
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). Dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi muda dan berintegrasi di SMA Semesta Semarang. *ABDIMAS*, 18(1).
- Hardiyanti, H. (2022). Pendidikan karakter berbasis Pancasila: Paparan sejarah ideologi, ideologi Pancasila dan relevansinya di era digital. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 5(1), 52-66.
<https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.73288>
- Hart, P. (2022). Reinventing character education: the potential for participatory character education using MacIntyre's ethics. *Journal of Curriculum Studies*, 54(4), 486-500.
<https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1998640>
- Idrus, M. (2007). Makna Agama dan Budaya bagi Orang Jawa. *Unisia*, 30(66), 391-401.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art7>
- Irawanto, D. W., Ramsey, P. L., & Ryan, J. C. (2011). Challenge of leading in Javanese culture. *Asian Ethnicity*, 12(2), 125-139.
<https://doi.org/10.1080/14631369.2011.571829>
- Jati, W. R. (2017). Memaknai kelas menengah sebagai aktor demokrasi Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1), 17-29.
- Kumalasari, D. (2015). Konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan taman siswa (tinjauan humanis-religius). *Istoria*, 8(1).
- Kusdarini, E., Sunarso, S., & Arpanudin, I. (2020). The implementation of Pancasila education through field work learning model. *Cakrawala Pendidikan*, 39(2), 359-369.
<https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.31412>
- Lestari, T. (2018). Analisis implementasi kebijakan penguatan pendidikan karakter. *Jurnal Kediklatan*, 3(1), 299-305.
- Muassomah, Abdullah, I., Istiadah, Mujahidin, A., Masnawi, N., & Sohrah. (2020). Believe in literature: Character education for Indonesia's youth. *Universal Journal of Educational Research*, 8(6), 2223-2231.
<https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080605>

- Murdiono, M. (2016). Pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran di SMP. *Jurnal SOCIA*, 15(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Oulad, M. (2015). The relationship between religion and individuals ' character. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 9(1), 4-13.
- Padgett, D. K. (2017). *Qualitative methods in social work research* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Pamungkas, C. (2017). Noken electoral system in Papua deliberative democracy in Papuan tradition. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(2), 219-236.
- Peterson, A. (2020). Character education, the individual and the political. *Journal of Moral Education*, 49(2), 143-157. <https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1653270>
- Puspitasari, R., & Rukiyati. (2020). Character Education of Java Culture Based on Total Quality Management in State High School, 9 Yogyakarta. *2nd International Conference on Social Science and Character Educations*, 398(ICoSSCE 2019), 240-244. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.049>
- Rahman, A. A., & Hidayah, K. (2011). Islam dan budaya masyarakat Yogyakarta ditinjau dari perspektif sejarah. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 13(1), 46-59. <https://doi.org/10.18860/EL.V0I0.2019>
- Retnasari, L., & Sumaryati, S. (2021). Strategi pendidikan karakter integritas berbasis masyarakat di satuan pendidikan dasar. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 53-62. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1739>
- Samsuri. (2011). Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun komperensi warga negara. *Kuliah Umum Di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Ahmad Dahlan 9 Mei 2011*, 1-13.
- Siswomihardjo, K. W. (1995). Peran filsafat dalam hidup berbangsa. In A. Lanur (Ed.), *Pancasila sebagai ideologi terbuka: problem dan tantangannya*. Kanisius.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suyato, S. (2016). Belajar demokrasi di sekolah: Re-orientasi pendidikan dan pengembangan kultur sekolah yang humanis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 82-95. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11078>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). *Introduction to qualitative research methods* (Fourth Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- Wen Lee, C.-, & Ande, T. (2022). Pancasila has the ability to improve community, nation, and state life in the twenty-first century. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(8), 1041-1047. <https://doi.org/10.36418/JRSSEM.V1I8.120>
- Yulianto, D., Sayekti, L. A., & Sugiyanto. (2020). Evaluasi program penguatan pendidikan karakter di Kulon Progo. Publikauma. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(2), 103-112.
- Zinnbauer, B. J., & Pargament, K. I. (2005). Religiousness and spirituality. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), *Handbook of the psychology of religion and spirituality* (pp. 21-42). The Guilford Press.